Call for Proposal

SUB-RECIPIENT NASIONAL
ADVOKASI & TECHNICAL ASISTANCE PROGRAM PADA
WANITA PEKERJA SEKS (WPS)

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan pada tahun 2012 di Indonesia ada 591.823 orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Sampai dengan triwulan 3 Tahun 2015, secara kumulatif sejak tahun 1987 telah dilaporkan temuan kasus HIV sejumlah 184.929 orang.

Penurunan prevalensi IMS pada Wanita Pekerja Seks (WPS) juga tercatat pada STBP 2009 dan STBP 2013 di 9 lokasi survei lainnya (Kota Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda, Bitung, Makasar, Sorong, dan Mimika). Prevalensi klamidia turun dari 39,5% menjadi 30,8% pada WPSTL dan dari 42,4% menjadi 40% pada WPSL. Prevalensi gonore mengalami penurunan pada periode waktu yang sama. Meskipun secara umum berdasarkan STBP terlihat adanya kecenderungan penurunan prevalensi HIV dan IMS lainnya pada WPS namun tingkat prevalensi ini masih relatif tinggi untuk mencapai Tujuan zero new infection sesuai Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan AIDS 2015-2019.

Infeksi baru HIV di Indonesia akan terjadi terutama melalui transmisi seksual, hal ini karena faktor jumlah pelanggan Pekerja Seks yang sangat besar dibandingkan dengan kelompok beresiko lainnya, konsistensi penggunaan kondom yang masih rendah dan masih tingginya prevalensi IMS pada pekerja seks. Untuk itu, masih diperlukan peningkatan coverage dan peningkatan kualitas penjangkauan untuk dapat meningkatkan perubahan perilaku baik pada WPS maupun pelanggan agar epidemi HIV melalui transmisi heteroseksual dapat ditekan serendah mungkin sehingga infeksi baru dapat diturunkan baik pada WPS, pelanggan dan masyarakat umum.

Penanggulangan AIDS nasional mendapatkan dukungan dari GFATM melalui mekanisme New Funding Model (NFM) untuk kurun waktu 2016-2017, dimana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menjadi salah satu penerima hibah utama (Principal Recipient = PR) untuk pelaksanaan beberapa kegiatan program.

Salah satu program yang menjadi tanggung jawab KPAN sebagai Principal Recipient (PR) adalah program Penjangkauan pada Wanita Pekerja Sex (WPS). Kegiatan ini akan di manage oleh LSM yang ditunjuk sebagai SR Nasional Program WPS melalui pelaksanaan oleh Implementing Unit (IU) di 75 kabupaten / kota. Salah satu kegiatan program yang menjadi tanggung jawab PR KPAN adalah program penjangkauan pada Wanita Pekerja Sex (WPS). Kegiatan akan dilaksanakan oleh Implementing Unit (IU) di 75 kabupaten / kota, yang akan

bekerja dibawah koordinasi Sub-Recipient Nasional. Disamping itu, PR memandang perlu untuk memiliki SR lain yang akan mendukung PR untuk menangani masalah teknis dan advokasi yang berhubungan langsung dengan program pada WPS.

Untuk itu KPAN mengundang OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) untuk mengajukan proposal dan mengikuti proses seleksi Sub Resipient (SR) Nasional untuk Technical Assistance (TA) dan Advokasi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SR

1. Mewakili WPS selaku penerima manfaat dari program (termasuk program dukungan GF ATM) dan berfungsi sebagai organisasi yang bersifat independent terhadap semua pihak.

2. Melakukan upaya Advokasi kepada Pemangku Kepentingan untuk menciptakan Lingkungan Kondusif (bersama KPA, SR Nasional CSS-RLB).

3. Melakukan monitoring kualitas dan evaluasi Implementasi Program pada WPS.

4. Mobilisasi Sumber daya untuk Pemberdayaan WPS

5. Memberikan dukungan teknis kepada program pada WPS (bekerjasama dengan SR Nasional Program Program Penjangkauan WPS).

C. WILAYAH KERJA

Program yang didukung oleh GFATM dengan New Funding Model (NFM) ini akan berlangsung selama 2 tahun dengan periode 1 Januari 2016 – 30 Desember 2017, bekerja di 16 provinsi dan 75 Kabupaten/Kota.

Wilayah Kerja SR terutama pada wilayah prioritas ini tetapi tidak terbatas untuk melakukan pada wilayah lainnya di Indonesia.

D. INTERVENSI DAN UKURAN KINERJA

1. Pencegahan Penularan HIV pada WPS dan Pelanggan:
    1. Adanya analisis terkait pencapaian kinerja jangkauan edukasi pada WPS
    2. Adanya analisis terkait pencapaian kinerja jumlah WPS yang mengikuti test HIV dan IMS lainnya
    3. Adanya analisis terkait pencapaian kinerja jumlah pasangan / pelanggan WPS yang mengikuti test HIV
2. Pemberdayaan WPS & Penguatan Komunitas
    1. Jumlah forum WPS yang terbentuk

    2. Adanya database WPS yang tergabung dalam forum
    3. Keterlibatan dan partisipasi bermakna dalam penyusunan guidelines, training modules, dll
3. Pengembangan Organisasi
    1. Adanya upaya mobilisasi sumberdaya untuk penguatan jaringan WPS dan pemberdayaan WPS
4. Monitoring dan Evaluasi:
    1. Keterlibatan dan partisipasi bermakna dalam penyusunan sistem Monev (termasuk pencatatan dan pelaporan kinerja program pada WPS)
    2. Keterlibatan dalam pengawasan dan supervisi kualitas program
5. Removing Legal Barriers
    1. Adanya kerjasama dengan SR Nasional CSS-RLB untuk adanya kebijakan dan mekanisme untuk mencegah kekerasan pada WPS
    2. Adanya kerjasama dengan SR Nasional CSS-RLB untuk meningkatkan anggaran domestik program pada WPS dan akses pada JKN.

E. KRITERIA SELEKSI

Organisasi (Calon SR) agar menunjukkan bukti :

1. Terdaftar sebagai entitas legal di Departemen Hukum & HAM atau Depdagri atau Kesbangpol setempat
2. Memiliki Kantor / Alamat yang dapat diverifikasi
3. Memiliki Profil Organisasi terbaru (tahun 2015) termasuk dengan deskripsi profile Sumber Daya Manusia (CV SDM) yang bekerja dalam Organisasi (CV Pimpinan Lembaga dan CV SDM utama).
4. Bersedia berkontribusi terhadap program, dalam bentuk ruang kantor, SDM, peralatan kantor, dll (dilampirkan dalam surat kesanggupan dan rincian kontribusi yang akan diberikan)
5. Organisasi memiliki pengalaman dan ikatan yang kuat dengan komunitas pekerja seks.
6. Organisasi memiliki anggota di Provinsi dan Kabupaten/Kota (data / informasi agar dilampirkan)
7. Organisasi sudah established (didirikan) minimal 2 tahun
8. Memiliki konsep untuk pemberdayaan wanita pekerja seks serta studi / penelitian terkait pekerja seks.

F. PROSES SELEKSI

Tim PR akan melaksanakan verifikasi administrasi, hasil verifikasi akan diajukan untuk proses lebih lanjut kepada Tim Panel Seleksi.

Tim Panel Seleksi terdiri dari Perwakilan Country Coordinating Mechanism (CCM), Technical Working Group (TWG), Kementerian Kesehatan (Sub Direktorat AIDS), Perwakilan Komunitas, Development Partners, Profesional dan KPAN.

G. PENILAIAN

Setiap Organisasi yang mengajukan aplikasi akan dinilai oleh Tim Seleksi.

Hasil penilaian :

1. Lolos Seleksi dengan Syarat
    a. Melengkapi dokumen administrasi / teknis yang dianggap kurang memadai (sesuai tenggat waktu yang diberikan)
2. Lolos Seleksi
    a. Selanjutnya akan memyampaikan Presentasi / mengikuti Wawancara
    b. Tim akan melaksanakan assessment ke institusi langsung ke lapangan
3. Tidak lolos seleksi

H. FORMAT PROPOSAL

Setiap organisasi yang berminat agar menyampaikan surat (Letter of Interest) permohonan / peminatan untuk menjadi SR dengan melampirkan proposal.

Proposal ditulis dalam format maximum 20 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan kertas A4. Proposal berisi bagian sebagai berikut:

- Halaman Depan/Cover;
- Executive Summary
  Summary harus menjelaskan kunci dasar dari strategy, pendekatan, metodologi, personnel dan rencana implementasi serta rencana monitoring dan evaluasi untuk memenuhi tugas sebagai SR.
- Isi Proposal
    - Latar Belakang Organisasi
    - Kinerja / Capaian Penting Organisasi (termasuk dalam hal pemberdayaan WPS / komunitas lokalisasi / lokasi / hotspot, dll)
    - Strategi, pendekatan, metodologi program pemberdayaan WPS
    - Portofolio Organisasi (daftar semua kegiatan/projek yang dilakukan organisasi, termasuk program pada WPS)
    - Penjelasan besaran organisasi (Nasional dan daerah)

- Penjelasan / substansi lain yang dianggap perlu.
- Lampiran
  - Seluruh lampiran yang diperlukan untuk memenuhi Kriteria Administrasi (pada ketentuan diatas)

I. JADWAL SELEKSI

No	Waktu	Proses
1	12 Feb 2016	Pengumuman Call for Proposal SR Nasional melalui website KPAN: http://www.aidsindonesia.or.id
2	19 Feb 2016	Batas Akhir Pengiriman Surat Pengajuan (Letter of Interest) oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan seluruh dokumen aplikasi melalui: http://www.aidsindonesia.or.id/oms (upload Surat Pengajuan pada isian "Lainnya" serta seluruh dokumen terkait sesuai isian dalam aplikasi) Jika akan mengirimkan Hardcopy (tidak wajib, jika softcopy telah di upload pada aplikasi) maka batas akhir pada Jumat, 19 Februari, pukul 16.00 WIB Alamat Pengiriman: Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPA Nasional Sekretariat KPA Nasional, Wisma Sirca Lt. 2 Jalan. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat - 10340 Telp : +6221 390 5918; Fax : +6221 390 5919
5	24 Februari 2016	Pengumuman OMS Lolos Seleksi (untuk mengikuti proses lebih lanjut)

Jika terdapat kebutuhan informasi dan pertanyaan; maka dapat dikirimkan kepada Panitia Pengadaan KPAN melalui email: procurement@aidsindonesia.or.id